WARTA KOTA

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

268 Anggaran Dipotong

Balai Kota, Warta Kota

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,3 triliun. Padahal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebanyak Rp 72,9 triliun sehingga ada selisih anggaran Rp 3,6 triliun dengan menghapus 268 program.

Tuty Kusumawaty, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta, mengatakan, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) APBD DKI 2015, Bapeda telah menghapus 268 item anggaran.

"Jumlah dan nilai tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara Pemprov DKI dan Kementerian Dalam Negeri," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (26/4).

Tuty mengatakan, kegiatan yang dipotong bukan hanya dari sektor belanja langsung, terutama belanja modal. Tetap anggaran dari sektor belanja tidak langsung juga ikut dikurangi dan dipotong.

Saat ditanya secara detail, Tuty tidak menyebutkan, kegiatan apa saja yang dipotong atau dikurangi di belanja tidak langsung.

"Yang pasti ratusan kegiatan yang dananya dicoret dan dihapus itu telah melalui pertimbangan yang matang dan tidak akan mengganggu pelayanan publik bagi warga. Juga berdasarkan arahan dari Pak Gubernur," kata Tuty.

Sudah benar dipotong. Karena dananya tidak akan semuanya habis. Proyek tahun jamak kemungkinan besar anggarannya tak terserap.

Prabowo Soenirman

Tidak terserap

Sementara itu, Prabowo Soenirman, anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus anggaran kegiatan *multiyears* atau tahun jamak.

Dikhawatirkan kegiatan pembangunan *multiyears* tidak akan terserap karena APBD DKI 2015 baru bisa digunakan pada bulan Mei.

"Sudah benar dipotong. Karena dananya tidak akan semuanya habis. Proyek tahun jamak kemungkinan besar anggarannya tak terserap," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, bila benar pencairan APBD DKI 2015 pada bulan Mei, artinya Pemprov DKI bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya memiliki waktu enam bulan efektif bekerja sebelum masuk ke dalam akhir tahun anggaran pada 15 Desember.

"Waktu hanya enam bulan secara efektif bekerja saya rasa tidak akan mampu kontraktor pemenang lelang untuk mengerjakan proyek pembangunan infrakstruktur dengan sistem multiyears. Jadi lebih baik dipotong saja. Lalu anggarkan pada tahun depan kembali," kata Prabowo. **(bin)**

Beberapa Anggaran Yang Dipotong

- Pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau dipotong Rp 903.740.579.098 dari total anggaran Rp 3.138.571.389.458.
- Pembangunan tanggul A pantai mendukung NCICD dipotong Rp 280 miliar dari total pagu anggaran Rp 1.281.865.471.112.
- Pembangunan jalan layang busway Kapten Tendean-Blok M-Ciledug dipotong Rp 99 miliar dari total pagu Rp 999.700.000.000.
- Pembangunan reservoir dan sumur resapan di sepanjang jalan arteri dikurangi Rp 25 miliar dari total pagu Rp 29.997.001.494.
- Pos pemadam bergerak jenis karavan dan kelengkapannya dicoret. Adapun anggarannya sebesar Rp 28.264.561.700.
- Belanja modal pengadaan peralatan pemancar UHF dicoret, anggarannya Rp 38,5 miliar.
- Pemeliharaan gedung Wali Kota Jakarta Barat dikurangi Rp 9.695.212.200 dari total pagu Rp 12.425.000.000.
- Pengadaan kapal pembersih sampah mutifungsi dicoret dengan anggaran Rp 13,86 miliar.
- Pembangunan kantor perpusatakaan dan arsip Kota Jakarta Timur dicoret dengan anggaran Rp 24.796.194.006.
- Rehabilitas total gedung SDN Lagoa 09/10 dicoret dengan anggaran Rp 14.165.852.258.